

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/385/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 26 Maret 2019

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/385/2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BARITO UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	$\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}}$ x 100%	Data Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Meningkatnya desa/ kelurahan yang yang terhubung listrik	Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	$\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan yang terhubung jaringan listrik}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}}$ x 100%	Data jaringan PLN	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Bagian Adm. Perekonomian Setda
3.	Menurunnya desa/ kelurahan *blankspot*	Persentase desa/kelurahan *blankspot*	$\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan } \textit{blankspot}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}}$ x 100%	Data jaringan komunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang tamatkan	Data rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan
		Angka melek huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk≥ 15thn yang melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk≥15thn}}$ x 100%	Data Melek Huruf	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya.	Data BPS, Dinas Kesehatan Prov. Kalteng	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yg meninggal karena hamil, bersalin dan nifas selama 1 thn}}{\text{Jumlah kelahiran Hidup di wilayah tersebut}} \times 100.000$	Data Kematian Ibu	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi	$\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi<1thn}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1000$	Data Kematian Bayi	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	$\frac{\text{Jumlah total pengeluaran}}{\text{Jumlah penduduk}}$	Publikasi BPS	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
7.	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Perhitungan Produk Domenstik Regional Bruto sektor pertanian yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik	Publikasi BPS	Dinas Pertanian
8.	Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Perhitungan Produk Domenstik Regional Bruto sektor perikanan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik	Publikasi BPS	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
9.	Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan	Perhitungan Produk Domenstik Regional Bruto sektor perkebunan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik	Publikasi BPS	Dinas Pertanian
10.	Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri	PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Perhitungan Produk Domenstik Regional Bruto sektor koperasi dan usaha kecil menengah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik	Publikasi BPS	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		PDRB sektor perdagangan	Perhitungan Produk Domenstik Regional Bruto sektor perdagangan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik	Publikasi BPS	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		PDRB sektor industri	Perhitungan Produk Domenstik Regional Bruto sektor industri yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik	Publikasi BPS	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
11.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Angka pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran terbuka usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}$ x 100%	Data angkatan kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pendapatan Perkapita Penduduk	Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang didapat dari keseluruhan rata-rata penduduk pada suatu periode tertentu.	Publikasi BPS	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
12.	Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	$PI_j = \frac{\sqrt{\left(\frac{C_i}{L_i}\right)^2 M + \left(\frac{C_i}{L_i}\right)^2 R}}{2}$ PI_j = indeks pencemaran C_i = konsentrasi parameter kualitas air i L_i = konsentrasi parameter kualitas air i M = maksimum R = Rerata	Data kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{Eu} - 0,1)\right)$ IKU = Indeks Kualitas Udara	Data kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH	Data kualitas LH	Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
13.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	$\frac{\text{Jumlah Capaian kinerja kunjungan wisata}}{\text{Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan}} \times 100\%$	Data kunjungan wisata	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
14.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang terjadi}} \times 100\%$	Data pelanggaran K3	1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
15.	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase kasus konflik yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah kasus konflik yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus konflik yang terjadi}} \times 100\%$	Data Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16.	Menurunnya penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$	Data Bidang Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17.	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap penerapan RB Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.	Laporan Hasil Evaluasi Indeks RB dari Kementerian PANRB	1. Semua Perangkat Daerah 2. Bagian Organisasi Setda
18.	Meningkatnya kualitas penerapan managemen kinerja	Nilai SAKIP	Predikat hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB	1. Semua Perangkat Daerah 2. Bagian Organisasi Setda

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		
19.	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Unit Penyelengara Pelayanan Publik dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
20.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah	Opini BPK	Penilaian opini yang di keluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keungan daerah	Laporan BPK	1. Semua Perangkat Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset

BUPATI BARITO UTARA,

RADALSYAH